DAFTAR BACAAN

BUKU

A.A. Oka Mahendra dan Hasanudin, 1997, *Tanah dan Pembangunan Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Politis*, Denpasar, Pustaka Manikgeni.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman, 2007, *Masalah-masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 1996, Citra Aditya Bakti.

Ali Sofwan Husein, 1997, *Konflik Pertanahan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Arie S. Hutagalung, 2002, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Herman Slaats dkk, 2007, *Masalah Tanah di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranda Media.

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, Peradaban.

R. Soeprapto, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Ramli Zein, 1994, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta, Rineka Cipta.

Urip Santoso, 2009, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.Surabaya.

Urip Santoso, 2013, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya, Airlangga University Press.

Urip Santoso, 2014, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Urip Santoso, 2014, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media*, Yogyakarta, Total Media.

JURNAL ATAU PROSIDING

Eman, 1996, *Aspek Kepentingan Umum Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, h. 68.

Ida Nurlinda, 2012, *Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumPasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, ProgramPascasarjana Universitas Airlangga, h. 8.

MAKALAH

Boedi Harsono, 1990, "Aspek Yuridis Penyediaan Tanah", Hukum dan Pembangunan Nomor2 Tahun XX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 1990, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 1991, "Reformasi Hukum Pertanahan", Seminar Sehari Memperingati Tri Dasawarsa UUPA, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 13 Oktober 1991, Malang.

INTERNET

https://www.kompasiana.com/adromeda888/54f812b9a333116a608b4b08/sby-tak-tahu-getir-sejarah-matos-malang-town-square diunduh 18 Desember 2019 pukul 08.30 wib

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961.

UndangUndang Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan.

Peraturan Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973